

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rumah Kupas Sebagai Solusi Permasalahan Masyarakat Pesisir Karangantu

Nisrinah Nadhilah¹, Sholih², Asyifa Ervira Masri³, Alya Rachma Assyifa⁴, Anisa Ramadhani Roselien⁵, Nisrinah Nadhilah⁶, Nailah Millati Azka⁷

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Ciwaru Raya, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117

*Corresponding author

E-mail: 2221200090@untirta.ac.id

Article History:

Received: Desember 2022

Revised: Desember 2022

Accepted: Desember 2022

Abstract: *Community empowerment is a process of Human Resource Development, but human resources have often become an obstacle to regional development, especially in coastal communities, karangantu coastal communities have community empowerment programs that make it a strategy that is quite helpful in the local community economy. Here the author uses a qualitative method of descriptive, with the results of research that Peel House is part of the change of the family economy, so they are not too dependent on the profits of fishermen catches.*

Keywords:

Community Empowerment, coastal communities, Community Empowerment institute

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.504 pulau, 13.466 diantaranya telah diberi nama. PBB telah mendaftarkan sebanyak 92 pulau terpencil sebagai rujukan dari wilayah perairan Indonesia ke laut lepas. Indonesia memiliki panjang pantai 95.181 kilometer dan terletak strategis di antara benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Luas wilayahnya sekitar 2.012.402 kilometer persegi, sekitar 5,8 juta kilometer persegi (75,7%), di mana 2.012.392 kilometer persegi. Perairan pedalaman, 0,3 juta kilometer persegi laut teritorial dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif (ZEE) Sebagai negara kepulauan dengan laut yang luas dan garis pantai yang panjang, sektor kelautan dan maritim sangat strategis bagi Indonesia dalam segala hal. Ekonomi dan lingkungan, sosial budaya, hukum dan keamanan. Meskipun demikian, bidang tersebut kurang mendapat perhatian serius di bidang kontinental saat ini (Fri. 2016).

Karangantu adalah salah satu daerah perairan yang terletak tidak jauh dari Banten Lama. Pelabuhan Karangantu terletak di desa Banten dengan letak geografis 5° 52' 24" Lintang Selatan (South Lintang) 105° 54'05"-106° 05'11" Bujur Timur (BT). zaman Kesultanan Banten tahun 1511 saat Malaka jatuh ke tangan Portugis, membuat

para pedagang muslim dari kawasan Arab, Persia dan Gujarat enggan berlabuh dan singgah di sana. Berkat kekayaan alamnya berupa lautan, Karangantu sendiri dijadikan sebagai sentra perikanan di Banten dan menjadi pelabuhan tempat kapal dan perahu nelayan ditambatkan sebagai sarana transportasi masyarakat pulau-pulau seperti pulau dua, tiga, kapal penarik, dan sebagainya.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Indonesia merupakan negara maritim yang potensi sumber daya alam laut, pesisir dan pulau-pulau kecilnya sangat besar dan kaya, sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi bangsa dan negara. Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menetapkan Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Nomor 27 Pasal 63 yang berbunyi: "Pemerintah dan pemerintah daerah memberdayakan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mempromosikan kegiatan komersial masyarakat pesisir dengan memperkuat usaha masyarakat dengan meningkatkan kapasitas dan menyediakan akses ke teknologi dan pengetahuan, modal, infrastruktur, keamanan pasar dan sumber daya ekonomi berguna lainnya."

Wilayah pesisir memiliki berbagai potensi, antara lain sumber pangan utama protein (terutama protein hewani yang berasal dari ikan, udang, dll), minyak bumi, gas, dan bahan galian lainnya yang berpotensi di bidang pertambangan, pariwisata, pembangunan perumahan dan industri. Oleh karena itu, wilayah pesisir merupakan kawasan strategis yang perlu dikelola untuk memenuhi hajat hidup masyarakat, terutama untuk pembangunan ekonomi yang dapat memberikan dukungan ekonomi kepada masyarakat sekitar, pemerintah daerah dan departemen lainnya. Pengelolaan kawasan pesisir mau tidak mau melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga berbagai kepentingan bersatu atas nama pembangunan pesisir.

Tingkat kesejahteraan sosial merupakan inti dari pembangunan nasional yang mencerminkan kualitas hidup individu atau kelompok. Menurut penelitian (Fadli & Nurlukman, 2018), upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak hanya mencakup perikanan yang berkelanjutan, tetapi juga bagaimana memastikan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang layak. Kehidupan. hidup dan mengatasi kemiskinan. Safitri (2017) menunjukkan bahwa masyarakat harus diinformasikan tentang pentingnya mendorong pembangunan ekonomi dan mendorong pemikiran modern untuk menerima perubahan ke arah yang lebih progresif. Sosialisasi dan pelibatan dapat menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir yang harus dilaksanakan secara menyeluruh melalui kegiatan sosial teknologi yang sesuai dengan usia.

Permasalahan yang ada di masyarakat pesisir dengan sumber daya yang begitu banyak tidak dimanfaatkan secara maksimal yaitu bahwa yang menjadikannya salah satu penyebab mengapa daerah pesisir menjadi daerah tertinggal, menurut (Lolowang et al., 2022) bahwa tingkat pendidikan masyarakat pesisir relatif rendah karena masyarakat pesisir memiliki anggapan bahwa pendidikan tidak memiliki peran penting terhadap profesi mereka. Kemudian pada dalam segi ekonomi para masyarakat pesisir memiliki penghasilan yang didapatkan masih bergantung pada pendapatan hasil tangkapan, hal ini yang menjadikan para masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka serta penguasaan teknologi tangkap yang rendah. Besarnya potensi kelautan tersebut ternyata tidak diikuti oleh kesejahteraan masyarakat pesisir nelayan. Hal ini terlihat di mana kondisi sosial ekonomi nelayan kita berbanding terbalik dengan potensi sumber daya alamnya (Ngurah et al., 2017.).

Dilihat dari permasalahan tersebut di atas kita memerlukan solusi untuk mengatasinya guna mengubah roda perekonomian pada masyarakat pesisir itu sendiri. Maka pemberdayaan masyarakat memiliki peran aktif dalam pembangunan daerah terutama daerah pesisir yang di mana jumlah masyarakat yang tergolong rendah dalam memberdayakan masyarakatnya sendiri, perlu diadakannya program pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat pesisir. Adapun tujuan program pemberdayaan masyarakat yaitu guna meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir Memberikan masukan berupa pendidikan dan pengetahuan agar mereka dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam yang tersedia. Pemberdayaan masyarakat pesisir seharusnya bersifat *bottom-up* dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang secara langsung berdampak pada kelompok sasaran masyarakat (Darmawan et al., 2021).

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat menjadi produktif dan berdaya saing dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya (Lukman, 2021). Pemberdayaan masyarakat berjalan seiring dengan perubahan pemikiran, perilaku dan gaya hidup, sehingga masyarakat memerlukan waktu untuk merenungkan dan memahaminya. Agar masyarakat memahami dari awal bahwa mereka adalah pelaku utama dan perlu berperan aktif, maka pelaku/alat pemberdayaan harus membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka selama proses sosialisasi yang mana tanggung jawabnya ialah sebagai fasilitator yang terlibat aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan di semua tahapan. Tujuan pemberdayaan adalah untuk memungkinkan individu untuk memaksimalkan dan mengakses sumber daya yang tersedia secara lokal untuk

meningkatkan standar hidup mereka sendiri. Masyarakat diposisikan sebagai pemain penting atau pusat pertumbuhan dengan metode ini. Pemberdayaan masyarakat dalam arti luas mengacu pada proses memampukan dan mendukung masyarakat untuk menggunakan lingkungan strategisnya untuk berperan aktif dalam mencapai keberlanjutan jangka panjang (Safyuddin et al., 2017).

Lembaga pemberdayaan masyarakat merupakan satu bentuk solusi adanya program pemberdayaan masyarakat terutama pada daerah pesisir Karangantu, dengan adanya permasalahan yang telah disebutkan, masyarakat Karangantu berhasil mendirikan lembaga pemberdayaan sendiri dengan memiliki partisipan yang aktif dalam rangkaian kegiatan dari awal hingga mereka menjadi masyarakat yang bisa menggali potensi sumber daya alam dengan membudidayakan serta mengolah kerang hijau menjadi kerang kupas. Lembaga pemberdayaan ini sangat membantu bagi sekitar masyarakat pesisir Karangantu terlebih dalam membantu para istri nelayan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sehari-hari mereka.

Dalam kasus ini mengambil dari sebuah lembaga pemberdayaan Rumah Kupas yang terletak di Desa Tanggul, kecamatan Karangantu, Kabupaten Serang, Banten. Sebagai salah satu contoh bentuk dari solusi yang di dirikan untuk menjadikan masyarakat pesisir Karangantu menjadi masyarakat mandiri.

Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Rumah Kupas memiliki pedoman teknis tersendiri, yang terdiri dari: 1) kebijakan pendukung, pelaksanaan program, pedoman berupa Surat Keputusan Bupati dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan desa merupakan unsur penunjang pengelolaan desa; 2) sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi kepada kelompok yang menjadi sasaran suatu kebijakan. Pada tujuan sosialisasi merupakan untuk membantu kelompok sasaran politik lebih memahami politik komunitas baru yang sebelumnya tidak dikenal. 3) sarana dan prasarana. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, sedangkan infrastruktur adalah segala sesuatu yang memberikan pada dukungan utama untuk menjalankan proses bisnis; 4) Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat secara sukarela, mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi program. Semakin tinggi partisipasi masyarakat sebagai kelompok sasaran program, maka semakin besar keberhasilan pencapaian tujuan program.

Program pemberdayaan membutuhkan peran masyarakat. Proses pemberdayaan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dengan keterlibatan dan partisipasi warga agar efektif. Agar pemberdayaan dapat terjadi dan berhasil, tidak hanya diperlukan partisipasi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi

kita juga perlu menciptakan manusia agar dapat menyesuaikan pemikiran dan tindakannya dengan perkembangan yang terjadi dan dirasakan. Bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam melanjutkan hasil atau upaya yang telah dilakukan di masa mendatang. Penguatan masyarakat desa meliputi pengembangan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa harus secara langsung mempengaruhi kepentingan masyarakat desa. Sebagai warga desa, mereka terlibat dalam proses pemberdayaan. Berkaitan dengan pelaksanaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, karena tanpa partisipasi masyarakat pembangunan berjalan lambat dan keberhasilan sulit dicapai.

Oleh sebab itu keberadaan masyarakat desa akan menentukan keberhasilan pembangunan desa dalam memberdayakan masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat desa itu sendirilah yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan desa. Dengan demikian, dalam proses pembangunan masyarakat, masyarakat tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek pembangunan.

Berdasarkan kejadian inilah sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Rumah Kupas sebagai lembaga pemberdayaan yang menjadi solusi pada permasalahan masyarakat pesisir di Karangantu.

Metode

Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan masalah dalam penelitian berkaitan dengan strategi pemberdayaan masyarakat dalam lembaga pemberdayaan masyarakat yang menyangkut dengan keberhasilan roda perekonomian melalui lembaga pemberdayaan. Objek penelitian adalah rumah kupas sebagai lembaga pemberdayaan yang berhasil menjadikan masyarakat Karangantu menjadi masyarakat yang mandiri. Sumber data yang diperoleh dari pengelola, anggota rumah kupas dan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertempat di Desa Tanggul, Karangantu, Kec. Kasemen. Kota Serang-Banten. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu menggunakan teknik wawancara terstruktur dan observasi:

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara Terstruktur merupakan sebuah mekanisme yang sistematis di mana untuk menggali informasi dan berita tentang pengelolaan pariwisata dan pemilik usaha pusat oleh-oleh yang menggunakan kondisi, di mana satu set pertanyaan ditanyakan kepada responden dengan urutan yang sudah siapkan sang pewawancara.

2. Observasi

Observasi ini memiliki kategori yang cermat yang mana informasi akan dicatat dan sebagian besar digunakan di gunakan dalam studi yang telah dirancang untuk memberikan deskripsi secara sistematis.

Waktu pencarian dilakukan dalam dua langkah untuk menemukan sumber yang relevan. Pencarian pertama dilakukan pada tanggal 16 September 2022 dan pencarian kedua dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2022.

Sumber data akan digunakan pada basis yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari observasi dan wawancara dengan sumber yang diperoleh dari pengelola, anggota wisma dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan memperhatikan, mendengarkan, bertanya secara sadar, orientasi dan dalam rangka memperoleh informasi yang diperlukan. Sedangkan sumber data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data yang sudah ada seperti buku dan artikel yang relevan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Sumber data sekunder ini diperoleh dari kajian internet, jurnal dan sumber lainnya.

Hasil

Dari hasil penelitian masyarakat pesisir Karangantu menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi yang menjadikan alasan utama bagi mereka pada kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menghambat perkembangan desa yang menjadikan masyarakatnya tidak mampu berkembang sesuai dengan pertumbuhan yang diharapkan pemerintah. Adapun penyebab lainnya yang menjadikan masyarakat pesisir Karangantu masih disebut dengan masyarakat tertinggal secara ekonomi. Dari permasalahan yang ditemukan berdasarkan data di lapangan, bahwa terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang di mana faktor eksternal menunjukkan bahwa dalam perjalanan dalam penangkapan ikan, kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi hasil tangkapan serta membuat nelayan terpaksa tidak pergi berlayar, hal ini juga diperkuat bahwa faktor utama yang sering menimbulkan permasalahan bagi nelayan dalam melaut adalah pemanasan global yang tentunya dapat mempengaruhi hasil dari produksi atau hasil tangkapan oleh nelayan (Ngurah et al., 2017), yang menjadikannya perubahan iklim, hal ini menyebabkan perubahan daerah penangkapan ikan dan musim, meningkatkan risiko melaut akibat gelombang tinggi dan angin kencang, serta menghambat kegiatan penangkapan ikan nelayan karena sedimentasi muara dan gelombang besar. Menurut Purnomo (2013), dampak perubahan iklim terhadap kegiatan penangkapan ikan adalah terjadinya peningkatan

frekuensi gelombang besar yang menjadi kendala bagi nelayan ketika hendak mengakses daerah penangkapan ikan. Kondisi laut yang keras menyebabkan nelayan berlama-lama berjam-jam untuk menangkap ikan, pada akhirnya mengakibatkan penurunan pendapatan melaut sedangkan pendapatan yang diperoleh nelayan dari melaut dipengaruhi oleh banyak hal.

Kemudian faktor eksternal lainnya yaitu hasil dan pendapatan tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan, para nelayan, penjualan hasil tangkapan harus menyesuaikan harga pasar dengan harga yang di banderol Rp. 37.000.00,-/kg. Hal tersebut tidak memungkinkan para nelayan mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka sehari-hari. Kelompok nelayan tidak bisa berlayar sesuka hati mereka jika berada di bawah naungan Dinas Perikanan, dikarenakan mereka berlayar sesuai dengan perintah yang telah diarahkan. Faktor ini pun menjadi penyebab dalam perolehan penghasilan bagi para nelayan.

Faktor internal pada permasalahan nelayan masyarakat pesisir Karangantu yaitu sifat masyarakat setempat sendiri masih ada yang hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Ditambah lagi, rata-rata masyarakat Karangantu juga adalah perantau. Dengan begitu, kehidupan masyarakat pun tidak akan ada kemajuan dan pasrah pada keadaan. Karena pemikiran masyarakat yang seperti itu juga dapat menjadi faktor utama dari terus menurunnya kualitas dari para nelayan setempat.

Dapat kita lihat dari dua faktor permasalahan tersebut menunjukkan masih banyak sekali penduduk nelayan yang bertempat tinggal di Karangantu dengan pendapatan yang masih terbilang rendah. Maka dengan begitu masyarakat sekitar membuat pemberdayaan agar membantu para suaminya yang berprofesi sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka membantu suaminya dengan cara menjadi buruh kupas kerang hijau, yang di mana hasil tangkapan tersebut diolah menjadi kerang kupas yang kemudian di jual ke pasar. Dengan adanya pemberdayaan ini pun dapat membantu para istri dari nelayan dan juga membantu perekonomian masyarakat sekitar. Peran aktif nelayan perempuan bekerja mencari tambahan penghasilan untuk keluarga diakibatkan oleh kondisi buruk yang selalu dialami Nelayan (Hardiansyah, 2016).

Pemberdayaan ini berlokasi di desa tanggul, yang di mana sebelumnya hanya di ikuti oleh beberapa masyarakat saja yang menginginkan tambahan. Desa Tanggul memiliki wilayah geografisnya terletak di tepi sungai yang bermuara bergerak ke laut, maka dari itu rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Potensi alaminya sebagai kerang hijau karena lokasinya yang menguntungkan untuk budidaya kerang hijau. Penduduk yang bermata pencaharian dengan mencari ikan

mencoba untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada di sekitar lingkungannya, terutama dengan menggunakan kerang hijau. Mereka melakukannya mulai dari proses awal membuat tempat tumbuh, merawat dan memanen kerang hijau. Bagi para istri atau ibu rumah tangga nelayan ada yang berspesialisasi dalam pekerjaan rumah tangga, ada yang bekerja tidak menetap, dan ada juga yang melakukan pekerjaan sampingan berupa warung-warung kecil di dalam rumah (Darmawan et al., 2021).

Lembaga pemberdayaan Rumah Kupas ini berawal hanya kegiatan rutinitas para istri nelayan yaitu mengupas kerang hijau guna membantu para nelayan suami dalam menambahkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, yang kemudian kepala desa Tanggul mencetus lembaga pemberdayaan ini menjadi wadah bagi para masyarakat pesisir Karangantu untuk mengembangkan diri dan juga daerah agar para masyarakat tidak lagi mengharapkan bantuan dari pemerintah, namun lembaga pemberdayaan ini masih pada tahap serba kekurangan, yaitu minimnya pengetahuan mengenai budidaya kerang hijau, tidak memiliki lahan tambak budidaya, sehingga para anggota rumah kupas hanya memanfaatkan hasil tangkapan yang dihasilkan oleh nelayan tangkap kerang yang berasal dari laut lepas.

Pada tahun 2018, lembaga pemberdayaan rumah kupas mendapatkan sekaligus menjadi sebuah gagasan untuk diresmikannya lembaga secara nyata, rumah kupas melakukan pemberdayaan kemitraan, sebagaimana dijelaskan tentang kemitraan bahwa kemitraan merupakan strategi antara bisnis dan organisasi nirlaba di mana risiko, sumber daya dan Keterampilan dibagikan dalam program yang menguntungkan masing-masing mitra maupun perusahaan. Kerja sama kemitraan dalam membangun lembaga secara resmi rumah kupas ini dilakukan dengan tiga pihak yaitu BNI Syari'ah, Dompot Dhuafa dan Rumah Kupas, BNI Syari'ah dan Dompot Dhuafa memberikan bantuan bukan hanya sekedar memberikan bantuan tunai, tetapi memberikan bimbingan, pelatihan dan pengetahuan mengenai budidaya kerang hijau, hal ini guna membuat masyarakat agar tak bergantung lagi pada nelayan kerang tangkap, hal ini juga akan memberikan para nelayan, baik nelayan suami dan nelayan istri memahami kondisi laut dan cuaca agar pertumbuhan budidaya kerang hijau berhasil dipanen, dan juga membuat masyarakat pesisir Karangantu secara mandiri mampu mengelola lembaga pemberdayaan rumah kupas agar terus berjalan.

Dalam rangkaian kegiatan dalam lembaga pemberdayaan rumah kupas terdiri dari pembekalan pengetahuan tentang budidaya, dan pelatihan mengenai cara memanen kerang hijau sesuai dengan yang diajarkan. Dalam pengolahan kerang hijau di lembaga pemberdayaan hampir 80% masyarakat pesisir Karangantu

mengikuti kegiatan dengan baik, selain itu adapun dalam lembaga pemberdayaan terdapat koperasi yang sangat membantu masyarakat pesisir dalam perekonomian selain dari hasil pengolahan kerang kupas. Partisipasi dalam komunitas adalah karena alasan keuangan. Mereka ingin memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Anggota koperasi yang berhasil mendapat tambahan penghasilan sesuai dengan kinerjanya, dan sebaliknya bila kinerja anggota menurun maka pendapatan juga menurun (Deviyanti, 2013). Pengelola koperasi juga dibuka bagi siapa pun tanpa ada syarat khusus hanya perlu memiliki niat dan kemauan untuk belajar. Dapat disimpulkan bahwa setiap anggota koperasi merupakan masyarakat yang ikut terlibat dalam pengolahan kerang hijau.

Dengan adanya lembaga pemberdayaan kerang hijau ini para anggota rumah kupas dapat menghasilkan kerang yang sudah dikupas dengan harga Rp. 47.000,00,-/kg dan kerang kupas yang dihasilkan dijual melalui usaha mitra yang sekaligus didirikan oleh Dompot Dhuafa, selain itu juga kerang yang telah dikupas dikirim ke distributor atau pasar yang setiap harinya. Meskipun, budidaya kerang kupas masih mengandalkan cuaca, hal ini tidak menjadi para nelayan budidaya kerang hijau sebuah masalah, karena dengan pembekalan yang telah diberikan kerang hijau akan tetap berkembang secara sempurna. Meskipun keberhasilan adanya kerang kupas tak jarang sekitar masyarakat pesisir Karangantu masih memilih membuka usaha warung, karena bagi mereka yang tidak termasuk anggota lembaga rumah kupas bahwa penghasilan dari kerang kupas tidak mungkin mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, dari itu semua sebagian besar masyarakat pesisir Karangantu, merasa terbantu berkat adanya lembaga pemberdayaan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Karangantu tidak lagi harus bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah, karena secara keseluruhan mereka mampu mengelola koperasi dan lembaga pemberdayaan rumah kupas itu sendiri hingga saat ini.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa permasalahan dari segi faktor internal maupun eksternal yang dirasakan oleh para masyarakat pesisir dapat menjadi sebuah hambatan bagi tumbuh kembangnya daerah suatu desa di pesisir terutama di daerah Karangantu. Suatu perubahan desa pesisir dapat dimulai oleh masyarakat itu sendiri demi memajukan kesejahteraan dirinya dan juga masyarakat lainnya, perubahan dapat dibentuk melalui gagasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pesisir dengan memanfaatkan sektor

sumber daya alam yang ada. Melalui program pemberdayaan masyarakat, menjadikan hal tersebut sebuah wadah bagi masyarakat pesisir guna memperbaiki Sumber Daya Manusia yang berada di desa pesisir, terutama dalam memajukan sektor perekonomian masyarakat yang menjadikannya masyarakat yang sejahtera.

Rumah kupas yang digagasi oleh salah satu masyarakat desa, secara tidak langsung dapat membantu dari segi perkembangan *life skill* yang mereka punya, serta perkembangan pada roda perekonomian. Kini para nelayan istri tidak perlu merasa khawatir dengan penghasilan yang didapat oleh nelayan suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, hal ini tentu saja bahwa para istri nelayan pun memiliki kemampuan dalam membantu nafkah bagi keluarga mereka. Mereka juga dibekali dengan pengetahuan bagaimana agar bisa membudidayakan kerang hijau itu sendiri. Lembaga pemberdayaan masyarakat melalui rumah kupas dapat di katakan sebagai solusi yang terbaik untuk daerah pesisir Karangantu.

Daftar Referensi

- Darmawan, D., Rawita, I. S., Siregar, H., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2021). *Partisipasi Nelayan Dalam Memanfaatkan Pengolahan Kerang Hijau Di Desa Tanggul Karangantu Banten Participation of Fisherman in Utilizing Green Shell Processing in The Village of Tanggu Karangantu Banten menyesuaikan kondisi masyarakat yang akan diberdayakan serta bidang- bidang*. 768–773.
- Deviyanti, D. (2013). *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Kecamatan Balikpapan Tengah* Dea Deviyanti. 1(2), 380–394.
- Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). *Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan)*. 1, 517–529.
- Hardiansyah, R. (2016). *Peran Kelompok Perempuan Dalam Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan*. 2, 1–16.
- Lolowang, J., Pangemanan, L. R. J., & Memah, M. Y. (2022). *Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara*. 3, 541–547.
- Lukman, A. I. (2021). *DIKLUS : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal di PKBM Tiara Dezzy Samarinda Community Empowerment through Non-Formal Education in Tiara Dezzy Community Learning Center Samarinda*. 2(September), 180–190.
- Ngurah, I. G., Yogiswara, A., & Sutrisna, I. K. (2017). *Kabupaten Badung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan dua pertiga wilayahnya terdiri dari wilayah perairan . Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 18 . 306 pul*. 3613–3643.
- Purnomo, D. (2013). *Pengaruh Penggunaan Modul Hasil Penelitian Pencemaran Lingkungan di Sungai Pepe Surakarta sebagai Sumber Belajar Biologi Pokok Bahasan Pencemaran Lingkungan terhadap Hasil Belajar Siswa*. FKIP UNS.

- Safitri, R. W. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program*. 12(2), 102–109.
- Safyuddin, Yunus, Suadi, & Fadli. (2017). *Model Pemberdayaan*. 31(2).